

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan negara sudah mengalami berbagai perubahan regulasi dari waktu ke waktu. Tujuan adanya reformasi tersebut adalah agar pesan yang ada di dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara yang mengharuskan keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dapat direalisasikan. Penetapan standar akuntansi pemerintah yang disahkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah yang kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual, serta disahkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Daerah berbasis Akrual merupakan bentuk nyata dari reformasi pengelolaan keuangan yang dilakukan secara berkesinambungan.

Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sendiri mensyaratkan pemerintah untuk menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual paling lambat 5 tahun sejak diterbitkannya Undang-undang tersebut. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dijadikan sebagai pedoman penyusunannya, dan disempurnakan

dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual merupakan sebuah proses yang berkelanjutan. Efek yang diperoleh dari penerapan SAP ini tidak dapat terlihat dalam waktu singkat. Penerapan standar akuntansi pemerintahan adalah kebijakan yang diambil pemerintah demi terciptanya pengelolaan keuangan yang lebih baik. Penerapan sebuah kebijakan baru bukanlah masalah yang mudah terutama dalam mencapai tujuan bersama. Penerapan sebuah kebijakan akan dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam penerapannya. Edward III dalam Subarsono (2005) mengungkapkan bahwa terdapat empat faktor yang dapat mempengaruhi penerapan sebuah kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Faktor lain yang juga dimungkinkan berpengaruh dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan adalah budaya organisasi dan motivasi.

Penelitian Saleh dan Pendlebury (2006) tentang perkembangan akuntansi akrual di Malaysia menunjukkan bahwa peningkatan profesionalisme dan perubahan teknologi menjadi faktor paling penting dalam perubahan basis akuntansi di pemerintahan. Penelitian Tickell (2010) juga menyebutkan lambannya penerapan akuntansi berbasis akrual di Fiji disebabkan oleh pembelian perangkat lunak yang tidak sesuai, ketergantungan pada konsultan dan rendahnya ketrampilan dasar akuntan sektor publik. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan kualitas dari teknologi informasi memiliki andil yang cukup besar dalam penerapan akuntansi berbasis akrual.

Perkembangan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan oleh organisasi bisnis tapi juga oleh organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah menjelaskan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan serta memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Perangkat teknologi informasi yang berkualitas akan dapat mempermudah, dan mempercepat pengolahan serta penyampaian informasi yang lebih akurat. Kualitas teknologi informasi berperan penting terhadap keberhasilan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Keberhasilan penerapan SAP tersebut juga membutuhkan SDM yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan.

Komunikasi merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah organisasi. Herbert (1981) dalam Warisno (2009) mendefinisikan komunikasi sebagai proses yang di dalamnya terdapat perpindahan pengetahuan dari seseorang kepada orang lain dengan maksud mencapai beberapa tujuan khusus. Robbins dan Judge (2013:336) menyatakan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian dan pemahaman makna. Sebaik apapun kebijakan, tidak akan berguna jika tidak diteruskan dan dipahami pihak lain. Komunikasi yang baik merupakan hal yang sangat penting bagi efektivitas kelompok atau organisasi

manapun. Penerapan akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana kebijakan yang dalam hal ini merupakan para pegawai di lingkungan kerja pemerintah kabupaten Lamongan. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga pelaksana kebijakan mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkanluaskannya. Sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula, agar penerapan berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Para pelaksana kebijakan akan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal.

Faktor lain yang dapat berpengaruh pada kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah budaya organisasi. Budaya organisasi dapat mempengaruhi cara pegawai dalam bertingkah laku, cara menggambarkan pekerjaan, dan cara bekerja dengan pegawai lain. Setiap organisasi selalu mengharapkan budaya organisasi yang baik karena baiknya budaya organisasi akan berhubungan dengan berhasil tidaknya organisasi mencapai tujuannya. Budaya organisasi yang positif akan memacu organisasi ke arah yang lebih baik. Sebaliknya, budaya organisasi yang negatif akan memberi

dampak yang kurang baik bagi organisasi. Menurut Cushway B dan Lodge D dalam Nawawi (2003), mengungkapkan bahwa budaya organisasi adalah suatu kepercayaan dan nilai-nilai yang menjadi falsafah utama yang dipegang teguh oleh anggota organisasi dalam menjalankan atau mengoperasionalkan kegiatan organisasi. Berdasarkan definisi budaya organisasi yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi merupakan sistem nilai-nilai yang diyakini oleh semua anggota perusahaan dan yang dipelajari, diterapkan, serta dikembangkan secara berkesinambungan, berfungsi sebagai sistem perekat, dan dapat dijadikan acuan berperilaku dalam perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan.

Motivasi yang dimiliki pegawai merupakan aspek yang cukup penting dalam penerapan sebuah kebijakan dalam instansi pemerintahan. Motivasi memberikan efek positif terhadap kinerja pegawai yang nantinya akan mempengaruhi penerapan dari sebuah kebijakan. Menurut Hasibuan (1996: 156), “motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang maksimal“. Pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan tersebut, merupakan hal yang sangat penting. Kesuksesan ataupun kegagalan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah tidak terlepas dari peranan perangkat kerja dan pengaruh dari faktor-faktor yang ada pada organisasi pemerintahan tersebut.

Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagai entitas akuntansi dan pelaporan berkewajiban untuk menerapkan SAP berbasis akrual. Kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan akan menjadi dasar diberikannya opini atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lamongan. Pemerintah Kabupaten Lamongan juga dituntut untuk mempersiapkan faktor-faktor pendukung dalam penerapan SAP tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini ingin menguji pengaruh dari faktor kompetensi sumber daya manusia, kualitas teknologi informasi, budaya organisasi, komunikasi serta motivasi terhadap kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah Kabupaten Lamongan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti adalah:

Apakah kompetensi sumber daya manusia, kualitas teknologi informasi, komunikasi, budaya organisasi, dan motivasi berpengaruh terhadap kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual di Pemerintah Kabupaten Lamongan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang diungkapkan, tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah:

Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, kualitas teknologi informasi, komunikasi, budaya organisasi, dan motivasi terhadap kesiapan

penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual di Pemerintah Kabupaten Lamongan.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Lamongan :

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai betapa pentingnya penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesiapan penerapan dari SAP untuk dilakukan perbaikan kedepan demi terciptanya ketertiban pelaporan keuangan.

2. Bagi Penulis :

Mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai standar akuntansi pemerintahan serta sebagai sarana penerapan teori yang diterima dalam perkuliahan dan di dalam literatur serta untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai gelar sarjana akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.

3. Bagi Penelitian Berikutnya :

Diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi dan bahan pertimbangan dalam mengadakan penelitian selanjutnya.

1.5. Sistematika Skripsi

Sistematika dari skripsi ini berisi lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, dengan uraian sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai hal-hal yang melatarbelakangi peneliti dalam perumusan masalah yang merupakan landasan pemikiran secara garis besar, rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan yaitu pengaruh kompetensi sumber daya manusia, kualitas teknologi informasi, budaya organisasi, komunikasi dan motivasi terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual serta pemilihan pemerintah Kabupaten Lamongan sebagai tempat penelitian, selain itu juga bab ini menjelaskan mengenai tujuan penelitian berdasarkan latar belakang penelitian, manfaat penelitian dari penelitian ini, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi konsep dan teori yang melandasi penulisan skripsi, yaitu mengenai keuangan daerah, siklus pengelolaan keuangan daerah, basis-basis akuntansi, standar akuntansi pemerintahan beserta faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan penerapannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan penerapan SAP seperti kompetensi sumber daya manusia, kualitas teknologi informasi, budaya organisasi, komunikasi, dan motivasi. Pada bab ini juga terdapat penelitian-penelitian sejenis yang pernah dilakukan peneliti sebelumnya,

hipotesis penelitian dan kerangka pemikiran yang digunakan sebagai acuan pola pemikiran penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang jenis penelitian yang berhubungan dengan pola peneliti merancang desain penelitian, jenis dan sumber data, prosedur bagaimana data dikumpulkan dari responden, serta teknik peneliti melakukan analisis data yang telah diperoleh. Jenis dan sumber data pada penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan instrumen kuesioner dengan teknik *sampling purposive*. Pada bab ini juga menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah para pegawai bagian keuangan di 27 SKPD pemerintah Kabupaten Lamongan. Sampel penelitian ini adalah 81 pegawai bagian keuangan di 27 SKPD pemerintah Kabupaten Lamongan. Penelitian ini merupakan penelitian analisis regresi dengan menggunakan SPSS sebagai alat analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan gambaran umum dari Kabupaten Lamongan yang menjadi lokasi penelitian. Bab ini juga berisi tentang hasil dan pembahasan yang menguraikan secara rinci analisis yang telah dibuat untuk menjawab permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pengolahan data. Hasil penelitian ini menunjukkan kompetensi sumber daya manusia, kualitas teknologi informasi dan motivasi

berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah Kabupaten Lamongan, sedangkan budaya organisasi dan komunikasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah Kabupaten Lamongan

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan dan saran penelitian. Pada bab ini dikemukakan kesimpulan penelitian sesuai dengan hasil yang ditemukan dari pembahasan terkait pengaruh kompetensi sumber daya manusia, kualitas teknologi informasi, budaya organisasi, komunikasi, dan motivasi terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah Kabupaten Lamongan. Saran yang membangun juga peneliti ungkapkan pada bab ini.